

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Lilis Puspitawati (2021:49) sistem informasi akuntansi adalah Kumpulan sub-sub sistem atau komponen-komponen baik fisik maupun *non* fisik yang saling berhubungan secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi.

Menurut Romney dan Steinbart (2018:10) sistem informasi akuntansi adalah

“Sistem yang dapat dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan.”

Kemudian menurut Azhar Susanto (2017:80) mendefinisikan Sistem

Informasi Akuntansi adalah:

“Kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Selanjutnya menurut Tuner, weickgenannt, & Copeland (2017:4) bahwa sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

Dari definisi sistem informasi akuntansi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi perusahaan untuk dapat mempermudah pekerjaan karyawan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga untuk menghasilkan informasi yang berkualitas agar dapat digunakan oleh pengguna informasi.

2.1.1.2 Definisi Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Efektivitas menurut Mardiasmo (2017:134) adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Siagian (2016:24) Efektivitas adalah

“pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya unuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.”

Kemudian menurut Schemerhon John. Jr (2018:23) mendefinisikan efektifitas adalah

“Pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA (seharusnya) dengan ouput realisasi atau OS (seharusnya) jika $OA > OS$ maka akan disebut dengan efektif.”

Berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang memuat sistem

perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa SIPD merupakan bagian dari Sistem Informasi Akuntansi yang di kembangkan dan dikelola oleh pemerintahan dan efektivitas SIPD yaitu untuk menghasilkan informasi yang berkualitas agar dapat digunakan oleh pengguna informasi dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.1.3 Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romey dan Steinbart (2017:635) yang dapat diukur dengan karakteristik efektifitas Sistem Informasi Akuntansi berikut ini :

- a) Kegunaan (*Usefulness*)
- b) Ekonomis (*Economy*)
- c) Keandalan (*Reliability*)
- d) Ketersediaan
- e) Pelayanan (*Customer service*)
- f) Kapasitas (*Capacity*)
- g) Kemudahan Pengguna (*Ease Of Use*)
- h) Fleksibel (*Flexibility*)
- i) Traktabilitas (*Tractabilily*)
- j) Auditbility
- k) Keamanan (*Security*)

Selanjutnya Menurut Mardi (2016:74) mengemuakan efektifitas sistem informasi akuntansi dapat diukur dengan karakteristik Sebagai Berikut:

- 1) Ketersediaan (*Availability*)
- 2) Keamanan (*Security*)
- 3) Pemeliharaan (*Maintanability*)
- 4) Terintegritas (*Integrity*)

Penjelasan dari karakteristik Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi menurut Mardi (2016:74) adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan (*Availability*)

Sebuah sistem informasi membutuhkan berbagai kesiapan untuk dioperasikan oleh perusahaan, yang sangat dibutuhkan oleh sebuah sistem adalah tersedianya pelayanan sistem secara tepat waktu.

2. Keamanan (*Security*)

Dalam suatu sistem informasi keamanan sangat diutamakan, karena sistem keamanan ini dapat mencegah penggunaan sumber daya yang tidak sesuai, serta tindakan pencurian sumber daya sistem.

3. Pemeliharaan (*Maintanability*)

Sebuah sistem informasi akuntansi diharapkan dapat diubah sewaktu-waktu apabila diperlukan, tanpa mengganggu kelancaran proses sistem yang lain, namun kegiatan ini harus melalui pengendalian yang jelas.

4. Terintegritas (*Integrity*)

Suatu sistem informasi yang berkualitas selain menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu dan diotorisasi, suatu sistem juga harus terintegritas dan dapat melaksanakan fungsi yang ditargetkan kepadanya secara utuh dan tidak ada aspek lain yang mempengaruhinya.

Berdasarkan karakteristik efektifitas sistem informasi akuntansi yang di kemukakan Mardi (2016:74), maka didalam penelitian ini menggunakan karakteristik efektifitas sistem informasi akuntansi tersebut sebagai indikator efektivitas sistem informasi akuntansi.

2.1.1.4 Tujuan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

(Fernando H. Siagian Direktorat Jendral Bins Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negri 2019). Sistem Informasi pemerintahan Daerah (SIPD) menggambarkan pengelolaan informasi pembangunan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lain yang saling terhubung. SIPD memiliki beberapa tujuan yaitu :

- a) Menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b) Menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik.
- c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

2.1.1.5 Ruang Lingkup Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD)

Fernando H. Siagian Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negri (2019). Menyatakan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Informasi Pembangunan daerah
Informasi pembangunan daerah meliputi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan analisis dan profil pembangunan daerah.
- b) Informasi keuangan daerah
Informasi keuangan daerah meliputi informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah,

informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi BMD, dan informasi keuangan daerah lainnya.

c) Informasi pemerintahan daerah lainnya

Informasi pemerintahan daerah lainnya meliputi, informasi LPPD, informasi EPPD, dan informasi perda.

d) Pengendalian dan evaluasi

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan SIPD.

2.1.2 Pengendalian Internal

2.1.2.1 Definisi Pengendalian Internal

Menurut Sukrisno Agoes (2012:100) mendefinisikan pengendalian intern sebagai Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a) Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan.
- b) Efektivitas dan efisiensi operasi Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

- c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan.

Adapun pengertian lainya menurut Hery (2016:159) Pengendalian Internal adalah

“Sebuah kesatuan perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh seluruh karyawan.”

Kemudian Wakhyudi (2018:18) mengemukakan Pengendalian Internal adalah

“proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan.”

Dari definisi diatas yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal merupakan protokol, prosedur, dan aktivitaas yang melindungi organisasi atau perusahaan dari risiko keuangan dan reputasi yang dilakukan untuk mencegah pencurian asset dan mematuhi peraturan.

2.1.2.2 Indikator Pengendalian Intern

Komponen pengendalian internal menurut COSO dalam *Internal Control Integrated Framework (ICIF) (Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission, 2013:4)*, yaitu :

- 1) Lingkungan Pengendalian (*Control Invironment*)
- 2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
- 3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
- 4) Informasi dan Komunikasi (*Information And Communication*)
- 5) Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Penjelasan dari komponen pengendalian internal menurut COSO COSO dalam *Internal Control Integrated Framework (ICIF) (Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission, 2013:4)* adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Berdasarkan rumus COSO, lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar etika dan perilaku, proses dan struktur, proses dan struktur ini memberikan dasar untuk pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi.

2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses dinamis dan interaktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi realisasi tujuan entitas, dan relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan, risiko pencapaian semua tujuan entitas akan dipertimbangkan. Oleh karena itu, penilaian risiko menjadi dasar untuk menentukan bagaimana organisasi harus mengelola risiko.

3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Menurut COSO, aktivitas pengendalian mengacu pada tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan pelaksanaan instruksi manajemen yang dirancang untuk mengurangi risiko pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian berlaku untuk semua

tahapan dalam proses bisnis dan semua entitas di seluruh lingkungan teknis.

4) Informasi dan Komunikasi (*Information And Communication*)

COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk menjalankan tanggung jawab pengendalian internalnya guna mendukung pencapaian tujuannya. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas tinggi dari sumber internal dan eksternal, serta informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen pengendalian internal lainnya.

5) Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Kegiatan pemantauan yang dilakukan di bawah COSO merupakan beberapa bentuk kegiatan evaluasi, baik yang berkelanjutan, independen maupun gabungan keduanya, untuk mengetahui apakah kelima komponen pengendalian intern tersebut mempengaruhi fungsi, keberadaan dan fungsi masing-masing komponen.

Dari penjelasan diatas yang telah di kemukakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal dilaksanakan dengan baik atau tidak, agar dapat ditemukan hasil dari pemantauan tersebut apakah menemukan kelemahan agar menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kembali pengendalian internal pada suatu orgnaisasi atau perusahaan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Definisi Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019:7) mengemukakan bahwa Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Roymond Budiman (2020:3) laporan keuangan adalah :

“suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu.”

Kemudian Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2019:2) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan pelaporan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:19) kualitas laporan keuangan adalah

“gabungan dari laporan keuangan yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 sebagai tahap untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang akan dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama 1 periode pelaporan”.

Menurut Mahmudi (2016:13) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah informasi yang disiapkan sebagai membantu stakeholders dimana dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil agar dapat lebih berkualitas. Selanjutnya menurut Baldrice (2015:12) kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”.

Dari definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pelaporan kegiatan organisasi atau perusahaan dalam akuntansi yang memberikan informasi untuk dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Hery (2015:8) Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

- 1) Dapat dipahami
- 2) Relevan
- 3) Keandalan
- 4) Dapat dibandingkan
- 5) konsistensi

Penjelasan dari Karakteristik Kualitas Laporan keuangan menurut Hery (2015:8) adalah sebagai berikut:

1) Dapat Dipahami

Agar bermanfaat, dalam penyajiannya laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh penggunanya sehingga pengguna laporan keuangan tersebut dapat mengerti informasi apa yang disampaikan di dalamnya dan dapat menginterpretasikannya.

2) Relevan

Agar bermanfaat, penyajian laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan penggunanya, dengan cara membantu penggunanya untuk mengevaluasi peristiwa dimasa lalu, masa kini ataupun peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

3) Keandalan

Agar laporan keuangan dapat bermanfaat, informasi yang disajikan juga harus handal. Informasi yang disajikan harus disajikan dengan sebenarnya dan terbebas dari kesalahan, informasi yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan kebenarannya oleh pengguna informasi tersebut.

4) Dapat Dibandingkan

Dalam penyajiannya, laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan yang telah disajikan dari sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan yang terdapat pada entitas lainnya. Ada dua cara untuk membandingkan laporan keuangan tersebut, pertama secara internal dimana entitas tersebut menerapkan kebijakan akuntansi yang sama setiap tahunnya, yang kedua secara eksternal dimana laporan keuangan dibandingkan dengan entitas lain yang memiliki kebijakana akuntansi yang sama dengan entitasnya.

5) Konsistensi

Dalam penyajian laporan keuangan, metode atau prinsip yang digunakan oleh suatu entitas harus sama dari periode ke periode selanjutnya dan tidak diperbolehkan berubah ubah. Dengan kata lain suatu entitas tidak diperbolehkan menggunakan satu metode di periode ini dan menggunakan metode yang berbeda di periode selanjutnya. Dalam penyajian laporan 16 keuangan ini diharapkan dapat menjaga konsistensinya agar laporan keuangan yang disajikan dapat tetap akurat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka indikator kualitas laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat dibandingkan dan konsisten.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi akuntansi Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan menurut sebagai berikut :

Menurut Marshall B. Romney & Paul J. Steinbart (2018:29) bahwa sistem informasi akuntansi berdampak pada kualitas laporan keuangan :

“Sistem informasi akuntansi memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan.”

Selanjutnya menurut Azhar Susanto (2013:37) :

“Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, yaitu informasi yang tepat guna (*relevance*), andal, lengkap, dan terpercaya (akurat).”

Selain menurut teori juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan, berikut penelitian yang mengemukakannya:

Menurut M Nurkholis Adji P dan Sari Andayani (2021) pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderisasi dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya menurut Rio Gusherinsya dan Samukri (2020) pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya system informasi akuntansi yang baik dan benar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan

Kemudian menurut Hanifah Fauadah dan Hari Setiyawari (2020) pada penelitiannya yang berjudul The Effect Of The Implementation Of Transparency And Accounting Information System On The Quality Of Financial Reports dengan hasil penelitian the results of the study conclude that the implementation of transparence has no significant effect on the quality of financial report, while the implementation of accounting information system has a significant effect on the quality of financial reports.

2.2.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan menurut sebagai berikut:

Menurut Mahmudi (2016:35) bahwa pengendalian internal berdampak pada kwaitas laporan keuangan :

“Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi buruk salah satu penyebab utamanya berasal dari lemahnya system pengendalian internal.”

Selanjutnya menurut Nuramalia Hasanah & Achmad Fauzi (2016:20)

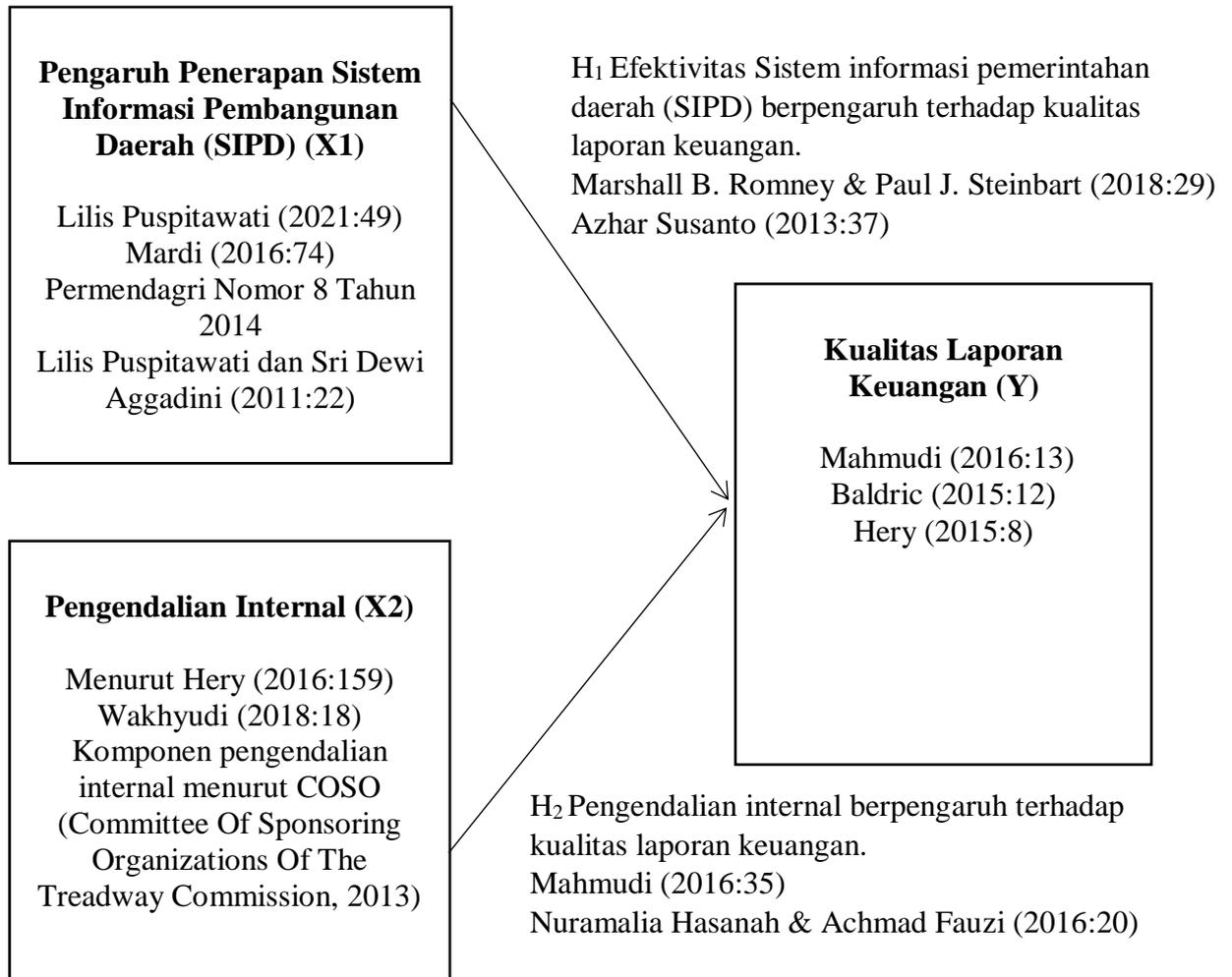
“System pengendalian internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajaranya salah satunya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan.”

Selain menurut teori juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa Pengendalian Internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan, berikut penelitian yang mengemukakannya:

Menurut Oka Reza Aditya dan Welly Surjono (2017) pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan hasil penelitian ini pelaksanaan 28system pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah menghasilkan nilai $r=0,603$ yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan positif.

Selanjutnya menurut Putri Andriani, Abin Suarsa, dan Yuniati (2019) pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PDAM Tirtawengi Kota Bandung dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di PDAM Tirtawengi Kota Bandung.

Kemudian menurut Edy Sujana, Komang Adi Kurniawan Saputra, dan Daniel Manurung (2020) pada penelitiannya yang berjudul Internal Cotrol System And Good Village Governance To Achieve Quality Village Financial Reports dengan hasil penelitian ini the results show that there are significant simultaneous effect between internal control system and good village governance of quality financial reports.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2022

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir.

Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang erat”.

Berdasarkan teori yang digunakan dan kerangka pemikiran, maka hipotesis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Efektivitas Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H₂ : Pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.